

**PERANGKAT DAERAH  
SUB KEGIATAN**

**: DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG DAN PERTANAHAN  
: SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN BIDANG PENATAAN RUANG**

**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)**

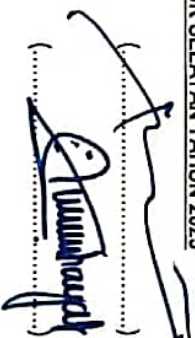
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikabr Gender
<p><b>Program :</b> penyenggaraan penataan ruang</p> <p><b>Kegiatan :</b> Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang - undangan bidang penataan ruang</p> <p><b>Kegiatan :</b> Kegiatan :</p> <p><b>Sub Kegiatan :</b> Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang - undangan bidang penataan ruang</p> <p><b>Tujuan :</b> Meningkatkan tingkat pemahaman stakeholder terhadap Kebijakan dan Peraturan Perundang - undangan Bidang Penataan Ruang</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang merupakan upaya penyampaian secara interaktif substansi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang yang dilaksanakan melalui tatap muka, media elektronik, media cetak, dan media lainnya.</li><li>Pada bulan Desember tahun 2020 Dinas PUTRP mengadakan salah satu bentuk sosialisasi peraturan perundang-undangan yaitu Konsultasi Publik KLHS RTRW dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang RTRW Kabupaten.</li><li>Pelaksanaan Konsultasi Publik tersebut di atas dihadiri oleh 65 peserta.</li><li>Komposisi jenis kelamin peserta Konsultasi Publik tersebut adalah 50 orang peserta laki-laki (77%) dan</li></ul>	<p><b>Akses :</b> Faktor lokasi kegiatan yang jauh dari asal peserta kemungkinan membuat Stakeholder yang diundang cenderung mengutus peserta berjenis kelamin laki-laki.</p> <p><b>Partisipasi :</b> Partisipasi peserta yang hadir baik laki-laki maupun perempuan cukup bagus. Jumlah yang sedikit tidak membuat peserta perempuan menjadi tidak aktif dalam sesi diskusi.</p> <p><b>Kontrol :</b> Tidak ada kekhawasan untuk mengutus peserta perempuan dalam kegiatan ini.</p> <p><b>Manfaat :</b> Kemungkinan pembahasan dalam kegiatan konsultasi publik yang tidak membahas hingga ke level gender membuat kegiatan ini tidak menarik peserta perempuan maupun stakeholder yang diundang menjadi tidak harus mengutus peserta perempuan.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Belum pahamiya pelaksana kegiatan terhadap konsep responsif gender.</li><li>Minimnya tingkat pemahaman stakeholder terhadap konsep responsif gender</li><li>Mewujudkan kegiatan sosialisasi penataan ruang yang responsif gender.</li><li>Melaksanakan sosialisasi penataan ruang dengan konsep responsif gender.</li><li>Membangun komitmen seluruh stakeholder untuk mendorong keterlibatan peserta perempuan menjadi lebih banyak dan lebih aktif dalam kegiatan ini.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Faktor lokasi kegiatan yang jauh dari asal peserta kemungkinan membuat Stakeholder yang diundang cenderung mengutus peserta berjenis kelamin laki-laki.</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>Melaksanakan sosialisasi penataan ruang dengan konsep responsif gender.</li><li>Membangun komitmen seluruh stakeholder untuk mendorong keterlibatan peserta perempuan menjadi lebih banyak dan lebih aktif dalam kegiatan ini.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pelaksanaan Konsultasi Publik KLHS (Sosialisasi Penataan Ruang) pada tahun 2020 dihadiri oleh 65 peserta.</li><li>Komposisi jenis kelamin peserta Konsultasi Publik tersebut adalah 50 orang peserta laki-laki (77%) dan 15 orang peserta perempuan (23%)</li></ul>	<p><b>Sub Kegiatan :</b> Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang - undangan Bidang Penataan Ruang</p> <p><b>Input :</b> Rp 36.300.000.-</p> <p><b>Output :</b> Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang - undangan Bidang Penataan Ruang tahun 2024</p> <p><b>Outcome :</b> Terwujudnya peningkatan tingkat pemahaman stakeholder terhadap Kebijakan dan Peraturan Perundang - undangan Bidang Penataan Ruang</p>


Lembar

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN	RENCANA AKSI	DATA DASAR (Base-Line)	INDIKATOR GENDER
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal				
	15 orang peserta perempuan (23%)  • Komposisi elemen yang hadir yaitu Perangkat Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Nagari, BUMD, Perusahaan Swasta, LSM, dan Akademisi Perguruan Tinggi.  • Tingkat kehadiran peserta disabilitas pada pelaksanaan konsultasi publik tahun 2020 tersebut belum ada.							

**TIM PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER  
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2023**

1. BAPPEDA
2. DP2KB
3. INSPEKTORAT
4. BPKD

  
 (.....)  
 (.....)

  
 (.....)  
 (.....)

### GENDER BUDGET STATEMENT / GBS (PERNYATAAN ANGGARAN GENDER)

**PERANGKAT DAERAH  
SUB KEGIATAN**

**: DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG DAN PERTANAHAN  
: SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN BIDANG PENATAAN RUANG**

Program	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
Kegiatan	Penetapan Rencanana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota	
Sub Kegiatan	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Tertaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang - undangan Bidang Penataan Ruang tahun 2024	
Tujuan Kegiatan	Meningkatkan tingkat pemahaman stakeholder terhadap Kebijakan dan Peraturan Perundang - undangan Bidang Penataan Ruang	
Analisa Situasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebab Kesenjangan Internal <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum pahamiya pelaksanaan kegiatan terhadap konsep responsif gender.</li> </ul> </li> <li>2. Sebab Kesenjangan Eksternal <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimnya tingkat pemahaman stakeholder terhadap konsep responsif gender.</li> <li>• Faktor lokasi kegiatan yang jauh dari asal peserta kemungkinan membuat Stakeholder yang diundang cenderung mengutus peserta berjenis kelamin laki-laki.</li> </ul> </li> </ol>	
Rencana Aksi	Komponen 1	Melaksanakan sosialisasi penataan ruang dengan konsep responsif gender.
	Komponen 2	Membangun komitmen seluruh stakeholder untuk mendorong keterlibatan peserta perempuan menjadi lebih banyak dan lebih aktif dalam kegiatan ini..
Alokasi Anggaran Output Kegiatan	Rp 36.300.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah)	
Dampak/Hasil Output Kegiatan	Terwujudnya peningkatan tingkat pemahaman stakeholder terhadap Kebijakan dan Peraturan Perundang - undangan Bidang Penataan Ruang	

**PENGUNA ANGGARAN,**

